

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2 pada
Program Studi Ilmu Lingkungan

Arum Padmarani Swarna Aurajati
2108011040003

**PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Disusun oleh:

Arum Padmarani Swarna Aurajati
21080110400003

Mengetahui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS

Pembimbing Kedua



Dra. Kismartini, M.Si



Ketua Program Studi
Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

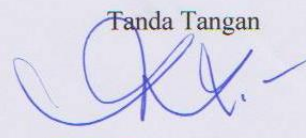
Disusun oleh:

Arum Padmarani Swarna Aurajati
21080110400003Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 25 Agustus 2011
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS

Tanda Tangan

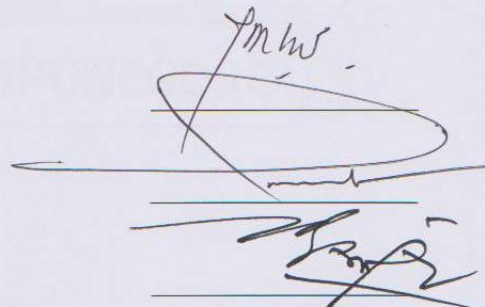


Anggota

1. Dra. Kismartini, M.Si

2. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

3. Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT



PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Semarang, September 2011

Arum Padmarani Swarna Aurajati
Arum Padmarani Swarna Aurajati

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1984, sebagai anak ketiga dari pasangan Bapak Handoyo Djojowinoto dan Ibu Murdiati Wiryo Soeparto. Menamatkan pendidikan SDN 03 Pagi Jakarta tahun 1995, SMPN 6 Mataram tahun 1998 dan SMAN 1 Mataram tahun 2001.

Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Perikanan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Brawijaya Malang tahun 2001, selesai pada tahun 2005. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010. Penulis berdomisili di Mataram dan bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Kabupaten Lombok Barat”. Melalui kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro sekaligus sebagai dosen penguji pertama,
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS selaku pembimbing utama,
3. Ibu Dra. Kismartini, M.Si, selaku pembimbing kedua,
4. Bapak Wahyu Krisna Hidajat, MT selaku dosen penguji kedua,
5. Para pihak terkait pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat, dan
6. Pihak-pihak lain yang telah mendukung dan membantu sehingga laporan tesis ini dapat diselesaikan.

Demikian dan harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada umumnya dan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat pada khususnya.

Semarang, September 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Batasan Wilayah Pesisir	7
2.1.2 Ekosistem Penting Wilayah Pesisir	8
2.1.2.1 Ekosistem Terumbu Karang.....	8
2.1.2.2 Ekosistem Mangrove	9
2.1.2.3 Ekosistem Lamun	10
2.1.3 Pengelolaan Wilayah Pesisir.....	11
2.1.4 Permasalahan di Wilayah Pesisir.....	12
2.1.5 Kebijakan Publik	14
2.1.6 Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir	15
2.1.6.1 Kebijakan Internasional.....	15
2.1.6.2 Kebijakan Nasional	16
2.1.6.3 Kebijakan Regional dan Lokal	18
2.1.7 Implementasi Kebijakan	19
2.2 Landasan Metode.....	27
2.2.1 Teknik Penentuan Informan	29
2.2.2 Teknik Pengumpulan Data	31
2.2.3 Teknik Analisis Data	31
III. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Kerangka Pikir Penelitian	34
3.2 Roadmap Penelitian	36
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.4 Fokus Penelitian.....	37

3.5	Jenis Penelitian dan Kuantitas Data.....	38
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6.1	Data Primer.....	38
3.6.2	Data Sekunder.....	39
3.7	Analisis Data.....	39
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1	Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	40
4.1.2	Iklim dan Hidrologi.....	41
4.1.3	Demografi.....	42
4.1.4	Administrasi Pemerintahan.....	43
4.1.5	Potensi Kelautan dan Perikanan.....	44
4.1.5.1	Ekosistem Pesisir.....	44
4.1.5.1.1	Ekosistem Terumbu Karang.....	44
4.1.5.1.2	Ekosistem Mangrove.....	45
4.1.5.1.3	Ekosistem Padang Lamun.....	47
4.1.5.2	Budidaya Air Tawar.....	48
4.1.5.3	Budidaya Air Payau.....	49
4.1.5.4	Budidaya Laut.....	49
4.1.5.5	Penangkapan Ikan.....	49
4.1.5.6	Pulau-pulau Kecil.....	50
4.1.5.7	Potensi Desa Pesisir.....	51
4.1.5.8	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Lombok Barat.....	53
4.2	Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Kabupaten Lombok Barat.....	54
4.3	Implementasi Kebijakan Pengelolaan WP3K.....	62
4.4	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	67
4.4.1	Kepentingan Kelompok Sasaran.....	67
4.4.2	Tipe Manfaat.....	68
4.4.3	Letak Pengambilan Keputusan.....	70
4.4.4	Sumberdaya.....	71
4.4.5	Komunikasi.....	76
4.4.6	Karakteristik Institusi dan Penguasa.....	78
4.4.7	Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran.....	80
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	86
	DAFTAR PUSTAKA.....	88
	RINGKASAN.....	93
	DAFTAR SINGKATAN.....	105
	LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Keaslian Penelitian.....	6
Tabel 2.	<i>Stakeholders</i> dan Kepentingannya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Kabupaten Lombok Barat.....	30
Tabel 3.	Fenomena Penelitian	37
Tabel 4.	Luas Wilayah Kabupaten Lombok Barat per Kecamatan....	38
Tabel 5.	Data Klimatologi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 ...	41
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat per Kecamatan Tahun 2009.....	42
Tabel 7.	Jumlah Kecamatan, Desa dan Dusun di Kabupaten Lombok Barat	43
Tabel 8.	Jenis-jenis Karang Dominan dan Biota yang Berasosiasi dengan Terumbu Karang di Kabupaten Lombok Barat	44
Tabel 9.	Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009.....	45
Tabel 10.	Keragaan Kondisi Potensi Sumberdaya Mangrove di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar.....	46
Tabel 11.	Ekosistem Padang Lamun di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar	47
Tabel 12.	Data Produksi dan Lahan Kegiatan Perikanan di Kabupaten Lombok Barat dirinci untuk masing-masing Kegiatan Tahun 2010.....	50
Tabel 13.	Nama dan Luas Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.....	51
Tabel 14.	Keragaan Potensi Sumberdaya Alam Pesisir di Kabupaten Lombok Barat.....	52
Tabel 15.	Susunan Tim Pokja Penyusunan RSWP3K Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010	60

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Hubungan antar Faktor dalam suatu Implementasi Kebijakan menurut Edwards (1980) (<i>Sumber: Subarsono, 2005</i>).....	21
Gambar 2.	Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi (<i>Sumber: Subarsono, 2005</i>).....	23
Gambar 3.	Komponen dalam Analisis Data (<i>interactive model</i>) (<i>Sumber: Sugiyono, 2009</i>).....	32
Gambar 4.	Kerangka Pikir Penelitian.....	35
Gambar 5.	Roadmap Penelitian Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Kabupaten Lombok Barat	36
Gambar 6.	Kedudukan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi dalam Perencanaan Hirarki Pengelolaan WP3K (<i>Sumber: UU No. 27 Th. 2007</i>).....	54
Gambar 7.	Kedudukan masing-masing Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi dalam Perencanaan Pengelolaan WP3K (<i>Sumber: UU No. 27 Th. 2007</i>).....	55
Gambar 8.	Kedudukan Rencana Strategis, Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan WP3K dalam Mekanisme Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Keuangan Daerah (<i>Sumber: DKP Kab. Lobar, 2007</i>).....	56
Gambar 9.	Rincian Alur Penyusunan RSWP3K (<i>Sumber: Lampiran Kep. Dirjen KP3K No.SK.35.a/KP3K/XI/2009</i>).....	59
Gambar 10.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan WP3K di Kabupaten Lombok Barat.....	82
Gambar 11.	Suasana <i>in depth interview</i> dengan Asisten III Kabupaten Lombok Barat/Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat (Dokumentasi Lapangan, 2011)	122
Gambar 12.	Suasana <i>in depth interview</i> dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat (Dokumentasi Lapangan, 2011)	122
Gambar 13.	Suasana <i>in depth interview</i> dengan tokoh masyarakat nelayan di Pesisir Pantai Kecamatan Sekotong (Dokumentasi lapangan, 2011).....	123

Gambar 14. Suasana <i>in depth interview</i> dengan tokoh masyarakat nelayan di Pesisir Pantai Kecamatan Batu Layar (Dokumentasi lapangan, 2011).....	123
---	-----

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Peta Lokasi Penelitian	107
Lampiran 2.	Keselarasan Arah Kebijakan antara RSWP3K, RPJPD dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat.....	109
Lampiran 3.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas/Instansi terkait Pengelolaan WP3K.....	112
Lampiran 4.	Program/Kegiatan Pengelolaan WP3K pada SKPD Terkait Tahun 2011	114
Lampiran 5.	Rekapitulasi Pegawai pada Dinas/Instansi Terkait WP3K Beserta Latar Belakang Pendidikannya Tahun 2011.....	116
Lampiran 6.	Tabel Ringkasan Wawancara	118
Lampiran 7.	Data Informan.....	121
Lampiran 8.	Dokumentasi Lapangan	122
Lampiran 9.	Surat Permohonan Ijin, Data dan Informasi untuk Penyusunan Tesis	124
Lampiran 10.	Surat Ijin Penelitian	125

ABSTRAK

Kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove, terjadinya konflik pemanfaatan potensi ruang kawasan pesisir serta penyimpangan pola pemanfaatan ruang pesisir di Kabupaten Lombok Barat merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah pada khususnya sebagai pembuat kebijakan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat, khususnya pada Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RSWP3K), serta mengkaji hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan model studi kasus dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap para pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSWP3K belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan bagi RPJMD, namun program/kegiatan terkait telah dilaksanakan, hal tersebut terjadi karena keserupaan sasaran RPJPD dengan RSWP3K selain itu juga karena tugas pokok dan fungsi terkait dari masing-masing dinas/instansi. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan tersebut antara lain kepentingan kelompok sasaran yang belum cukup terakomodir, letak RSWP3K yang dianggap kurang tepat, sumberdaya finansial dan SDM yang masih kurang, komunikasi yang lemah, penempatan pegawai/pejabat pada posisi yang kurang tepat dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Kata Kunci: kebijakan publik, pengelolaan pesisir terpadu

ABSTRACT

Damage to coral reefs and mangroves, the potential conflict of space utilization as well as coastal areas of coastal space utilization pattern of irregularities in the District of West Lombok are the responsibility of local government in particular as public policy makers. The aims of this study were assessing the implementation of policy on integrated coastal zone management in West Lombok regency, especially in the Strategic Plan for Management of Coastal Areas and Small Islands (RSWP3K), as well as reviewing the obstacles encountered in implementing the policy. This study used a model case study with descriptive research method with qualitative approach through in-depth interviews of stakeholders. The results showed that RSWP3K not fully serve as a reference for RPJMD, but the programs/activities related to have been implemented, it happens because the similarity with the target RPJPD and RSWP3K, it was also because roles, responsibilities and functions linked from each department/agency. Obstacles encountered in implementing the policy include the interests of target groups that have not been sufficiently accommodated, where the RSWP3K which was considered less appropriate, lack of financial and human resources, weak communication, the placement of employee /officials in a less precise position and awareness society was still low.

Keywords: public policy, integrated coastal management

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.480 pulau yang terdiri dari sejumlah pulau besar dan lebih dari 1.000 pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Adapun wilayah laut teritorial seluas 5,8 juta km² atau sebesar 63% dari total wilayah teritorial Indonesia, dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta km² dan garis pantai sepanjang 95.181 km (Numberi, 2009). Hal-hal tersebut menjadikan wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang tinggi seperti mangrove, terumbu karang (*coral reefs*) dan padang lamun (*sea grass beds*). Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, menurut Supriharyono (2007) wilayah ini sangat produktif dengan keberadaan estuaria, hutan bakau, padang lamun serta terumbu karang, sehingga sedemikian panjangnya pantai Indonesia merupakan potensi sumberdaya alam yang besar untuk pembangunan ekonomi.

Keanekaragaman sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir, mengakibatkan wilayah ini umumnya merupakan pemusatan berbagai kegiatan pembangunan seperti pemukiman, pertambakan, tempat rekreasi, sarana penghubung dan sebagainya. Terdapat sebanyak 60% penduduk Indonesia diperkirakan tinggal dan hidup di wilayah pesisir (Supriharyono, 2002). Sejalan dengan penambahan penduduk di Indonesia yaitu sebanyak 237.556.363 jiwa (BPS, 2010), tentunya memberikan tekanan yang besar kepada wilayah ini khususnya akibat aktivitas manusia.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumberdaya alamnya masing-masing, termasuk wilayah pesisir dan laut. Hal ini juga termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota di

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 2.215,11 km² terdiri dari wilayah darat seluas ± 1.053,92 km² dan perairan seluas ± 1.161,19 km² (Bappeda Lobar, 2010a) yang dikelilingi garis pantai sepanjang 120 km serta pulau-pulau kecil (*gili*) sebanyak 23 buah (DKP Kab. Lobar, 2010).

Menurut Bapedalda NTB (2006) kerusakan terumbu karang secara nasional diperkirakan sebesar 70% dan menurut Bachtiar (2004) kondisi terumbu karang di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kategori baik sekitar 8,82%, kategori sedang 38,24% dan kategori jelek 52,94% dengan tiga penyebab kerusakan utama yang bisa diidentifikasi adalah pengeboman ikan, pemucatan karang akibat El Nino dan pembuangan jangkar. Menurut Bappeda Kab. Lobar (2010a) potensi terumbu karang di Kabupaten Lombok Barat adalah seluas 258,1 ha dengan 30,70% dalam kondisi baik, 29,20% dalam kondisi rusak ringan dan 40,10% dalam kondisi rusak berat. Hasil identifikasi Yusuf (2006) menunjukkan bahwa penyebab kerusakan terumbu karang di Kabupaten Lombok Barat yang utama adalah penggunaan bahan kimia potasium serta sianida untuk penangkapan ikan. Menurut Bappeda Kab. Lobar (2010a) kerusakan ekosistem juga terjadi pada hutan mangrove yang ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu dari seluas 606,81 ha, terdapat sebanyak 118,83 ha dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat sebesar 487,98 ha.

Berbagai konflik juga sering terjadi antara pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan potensi ruang kawasan pesisir di Kabupaten Lombok Barat seperti konflik pemanfaatan ruang kawasan pariwisata dengan pemukiman masyarakat di Pantai Senggigi Kecamatan Batu Layar. Selain itu konflik juga terjadi akibat adanya konversi lahan menjadi tambak, serta adanya penyimpangan pemanfaatan ruang pesisir yang tidak sesuai dengan alokasi tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (DKP Kab. Lobar, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2010) pola pemanfaatan ruang pesisir di Kabupaten Lombok Barat telah mengalami penyimpangan, yaitu pemanfaatan ruang kawasan pesisir tidak saling kompatibel. Hal ini terjadi ketidakserasian antara sektor perikanan dengan penambangan emas, pariwisata dengan penambangan emas, perikanan dengan transportasi laut serta pariwisata dengan perikanan.

Terkait hal-hal tersebut di atas tentunya dibutuhkan suatu pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Kegiatan pembangunan yang menyebabkan penyimpangan dalam pemanfaatan ruang serta aktivitas masyarakat yang menyebabkan kerusakan ekosistem wilayah pesisir, tentu memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang ada di daerah tersebut. Pemerintah daerah pada khususnya sebagai pembuat kebijakan tentu menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan ataupun kerusakan ini, menurut Dye (1981) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Menurut Subarsono (2005) konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Menurut pandangan David Easton yang dikutip oleh Dye (1981), ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

Menurut Dye (1981) dan Anderson (1979) terdapat tiga manfaat penting studi kebijakan publik. Manfaat pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu melalui studi ini dapat ditemukan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Manfaat kedua yaitu membantu para praktisi dalam memecahkan masalah, yaitu dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasar teoritis mengenai bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Manfaat yang terakhir berguna untuk tujuan politik yaitu kebijakan publik yang disusun melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat telah dituangkan dalam Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP3K) 2005-2025 seiring dengan diundangkannya Undang-undang

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pelaksanaan RSWP3K tersebut tentunya membutuhkan komitmen dan koordinasi dari semua sektor yang terkait, namun pada kenyataannya hal ini sering kali tidak berjalan dengan baik. Masing-masing stakeholder memiliki kepentingannya masing-masing yang tidak jarang mengesampingkan kepentingan dari sektor lain, sehingga tidak menutup kemungkinan kebijakan suatu sektor tidak sejalan dengan kebijakan dari sektor lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penting untuk dilakukan kajian mengenai implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat, mengingat nilai penting dari wilayah pesisir, potensi pesisir yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat, tekanan yang terjadi terhadap wilayah pesisir akibat aktivitas pembangunan serta manfaat dari pentingnya suatu studi mengenai kebijakan publik. Selain itu kajian ini juga penting dilakukan mengingat belum adanya penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan berkelanjutan sudah tentu menjadi hal yang harus dicapai mengingat peran penting wilayah ini. Pemanfaatan yang tidak berkelanjutan tentu akan menghilangkan manfaat wilayah tersebut, yang apabila telah mencapai kerusakan permanen, maka tidak hanya manfaat ekonomi ataupun sosialnya saja yang hilang tetapi juga manfaat ekologisnya. Penyimpangan dalam pemanfaatan ruang dan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir yang dijumpai di Kabupaten Lombok Barat memberikan indikasi bahwa kegiatan pembangunan ataupun aktivitas manusia merupakan kontributor utama terjadinya penyimpangan dan kerusakan tersebut.

Terjadinya kegiatan pembangunan yang menyebabkan penyimpangan dalam pemanfaatan ruang pesisir dan aktivitas manusia yang merusak ekosistem wilayah pesisir tidaklah lepas dari kebijakan-kebijakan publik yang ada di Kabupaten Lombok Barat itu sendiri dalam hal ini kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Kabupaten Lombok Barat sebagai pembuat

kebijakan tentu menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan dan kerusakan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, dapatlah dinilai bahwa kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini tertuang dalam RSWP3K 2005-2025 belum dapat memaksimalkan kesesuaian pemanfaatan wilayah pesisir dan menghentikan aktivitas manusia yang merusak ekosistem di wilayah ini, sehingga timbul suatu pertanyaan : “Apa yang terjadi dengan implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat?”, untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa hal yang dapat dijadikan pendekatan dalam pemecahan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai dalam implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Kabupaten Lombok Barat ini adalah untuk :

1. Mengkaji implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat, khususnya pada rencana strategis Kabupaten Lombok Barat mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
2. Mengkaji hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir selanjutnya.

2. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi kebijakan publik pada umumnya dan implementasi kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam pada khususnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai kajian kebijakan dan pengelolaan sumberdaya alam telah banyak dilakukan, di antaranya :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Metode
1	Muslim/2010	Evaluasi Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pola pemanfaatan dan penyimpangan ruang kawasan pesisir dievaluasi dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG); kompatibilitas pemanfaatan ruang dievaluasi dengan matriks kompatibility; untuk menilai persepsi <i>stakeholder</i> terhadap prioritas pemanfaatan dan pengembangan ruang kawasan pesisir digunakan proses analisa hirarki (<i>Analytical Hierarchy Process – AHP</i>)
2	Ruhimat/2010	Efektivitas Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar	Metode penelitian berupa studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung dan kajian dokumentasi
3.	Syahrudin/2010	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri	Data diperoleh melalui wawancara langsung kepada para informan yang terkait dengan objek masalah. Menggunakan metode analisis interaktif dan pendekatan teori implementasi Edwards III (1980).
4.	Dedy Iman Wahyudi/2009	Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Brebes	Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Analisis implementasi dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi Edwards III (1980) dengan analisis data menggunakan model analisis taksonomis.
5.	Irfan Agustian Iswandaru/2005	Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora	Menggunakan teori menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Ken Blanchard, Winardi dan Thoha yaitu implementasi kebijakan, kemampuan organisasi, pengawasan dan komunikasi.